

PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA PADA PILKADA SERENTAK 2015

Mery Anggraini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

meryarifin26@gmail.com

Abstract: This study analyzes the effect of money on the political participation of the people of Dharmasraya Regency. The research method used is explanatory research. The purpose of this research is to see more about money politics against the level of political participation of the people of Dharmasraya Regency. The event of local democracy is very closely helping it with the political participation of the people. Every vote cast determines the future of an area. Several factors are needed to encourage the community to agree. The trend of money politics or political transactions in the implementation of general elections is no longer a taboo thing. Political rationality is supported because representation of money politics can license the meaning of democracy itself. In the 2015 Regional Head Election, money politics transactions still attracted the people of Dharmasraya District in the elections. Money politics and the level of political participation have a weak positive relationship. However, this factor does not only affect the community in the middle to lower economy but also the people with a very good level of welfare. Successful, money politics affects every social and economic layer of the Dharmasraya Regency community.

Keywords: Money Politics, Political Participation, Election

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Perhelatan demokrasi lokal sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat. Setiap suara yang diberikan menentukan masa depan suatu daerah. Terdapat beberapa faktor mendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi. *Trend* politik uang atau transaksi politik dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum bukan lagi menjadi hal yang tabu. Rasionalitas politik yang didorong karena adanya transaksi politik uang dapat melemahkan makna demokrasi itu sendiri. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 transaksi politik uang masih menjadi daya tarik masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam berpartisipasi. Politik uang dan tingkat partisipasi politik memiliki hubungan yang positif yang lemah. Namun, faktor ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat pada ekonomi menengah ke bawah tetapi juga masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sangat baik. Artinya, politik uang mempengaruhi setiap lapisan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Kata Kunci: Politik Uang, Partisipasi Politik, Pilkada

A. PENDAHULUAN

Partisipasi politik secara universal diakui sebagai elemen inti dari demokrasi sejak zaman klasik. Dalam perkembangan demokrasi menjadikan partisipasi sebagai sesuatu yang penting dan sentral dalam kehidupan berpolitik dan berpemilu. Dimensi-dimensi atau cakupan dari studi partisipasi masyarakat terus mengalami perkembangan, baik dari sisi teori maupun dari segi metodologinya, serta dari isu-isu yang dikaji. Dalam konteks akademik dan politis, isu kehadiran pemilih pada pemilu merupakan sesuatu yang penting, karena dapat menentukan tingkat legitimasi politik pada pihak yang berkuasa dan penyelenggara pemilu. Selain itu, arti penting *voter turnout* juga berkaitan dengan kepercayaan warga pada demokrasi dan masa depan politik suatu negara.

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Pemberian suara dalam kegiatan Pemilihan

umum merupakan bentuk partisipasi yang terbiasa, yang seringkali lebih luas dibandingkan dengan partisipasi politik lain. Kegiatan partisipasi politik meskipun kelihatannya hanyalah menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja untuk membantu pemilihan, membantu di tempat pemungutan suara, mencari dukungan untuk calon dan tindakan-tindakan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pemilihan umum merupakan partisipasi kolektif yang konvensional (Sudijono Satroatmodjo, 1995:78).

Penelitian yang dilakukan Aidinil Zetra dkk, (2010) tentang kinerja demokrasi di Sumatera Barat menyimpulkan bahwa bangunan demokrasi di daerah ternyata lemah. Demokrasi tidak memiliki landasan terpentingnya yaitu partisipasi politik meskipun demokrasi prosedural mengalami berbagai perbaikan seperti kualitas penyelenggaraan Pemilu dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya, kebebasan mendirikan partai politik, dan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi di dalam Pemilu melalui jalur non-partai juga dijamin, namun demokratisasi seperti itu ternyata tidak menjamin terwakilnya kepentingan rakyat dalam proses-proses-politik yang demokratis. Permasalahan yang sangat kentara adalah ternyata demokrasi yang tumbuh adalah demokrasi berbasis politik transaksional.

Jika dilihat dari teori pilihan rasional, James Coleman (2011:37-38) menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya.

Sebagaimana yang dikutip Sri Nuryanti (2014:155), dalam tulisannya, Larry Diamond menyebutkan bahwa partisipasi yang dilandasi oleh motif lain akan melahirkan demokrasi semu (*pseudo democracy*), dimana demokrasi yang berlangsung bukan demokrasi yang sebenarnya demokrasi. Pemilih akan menganggap wajar atas *money politics* yang terjadi, karena bisa jadi hal itu sudah menggejala secara umum di berbagai wilayah. Burhanudin Muhtadi dalam hasil survei indikator (2013) bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pemilih yang tinggal di desa lebih rentan terhadap sasaran politik uang.

Pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2015 yang lalu ditetapkan sebagai "Pilkada Serentak" yang diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang kepala daerahnya habis masa jabatan di 2015. Terdapat 9 provinsi dan 259 kabupaten/kota di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada. Salah satu kabupaten yang menjadi peserta Pilkada serentak di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Dharmasraya. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada Serentak 2015 relatif tinggi yaitu 72,90 %. Hal ini menjadi menarik mengingat Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah otonom baru.

Tidak hanya itu perolehan suara terbanyak dipegang oleh pasangan Sutan Rizka Kerajaan/Amrizal Dt. Rajo Medan (SUKA AMAN) yaitu 61.855 suara atau 69,59% yang merupakan Bupati termuda di Indonesia. Sedangkan pasangan incumbent Adi Gunawan/Jonson Putra (AG-JOS) hanya memperoleh 35.410 suara atau 36,41%. Dibalik tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada 2015 temuan politik uang juga tidak dapat dihindarkan. Hal ini terlihat dari temuan adanya oknum rukun tetangga (RT) yang membagi uang kepada masyarakat. (<http://beritanda.com/index.php/suara-Pemilu/10410-sebagian-besar-daerah-di-sumbar-ditemukan-pelanggaran-Pilkada-serentak>).

Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan adanya temuan transaksi politik menjadikan sesuatu yang menarik untuk melihat bagaimana pengaruh

politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada Serentak 2015 ?

B. KERANGKA TEORI

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik (Huntington dan Nelson, 1994:1). Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Secara umum partisipasi politik dimengerti sebagai aktifitas individu untuk mempengaruhi kebijakan politik, maupun negara atau pemerintahan. Menurut Sudijono Sastroatmodjo (1997:65) partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Huntington dan Nelson (1994:6) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Di dalam pengertiannya Huntington dan Nelson memberikan beberapa batasan sebagai berikut; *Pertama*, mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. *Kedua*, partisipasi politik adalah kegiatan politik warga negara preman. *Ketiga*, kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah terlepas kegiatan tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Selanjutnya mereka membagi partisipasi politik menjadi dua yaitu (Huntington dan Nelson, 1994:6-9);

- a. Mobilisasi, merupakan partisipasi yang dilakukan berdasarkan ajakan atau anjuran dari orang lain.
- b. Otonom, dimana seseorang berpartisipasi berdasarkan keinginan dan kesadaran diri sendiri untuk melakukannya.

Sejalan dengan Huntington dan Nelson, Ramlan Surbakti (1999:15-16) menjelaskan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Selain itu partisipasi juga dapat mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku tidak selalu berupa partisipasi politik.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Sementara itu Rush dan Althoff (2001:141) memberi batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan dalam aktifitas pada suatu sistem politik.

Partisipasi politik, menurut Herbert McClosky yang dikutip oleh Damsar (2010:180) di dalam "Pengantar Sosiologi Politik" dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses Pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Definisi lain berdasarkan *Handbook Of Political Sciences* yang dikutip Yalvema Miaz (2012:22) mengungkap partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Politik Uang

Dilihat dari teori pilihan rasional, James Coleman (2011:37-38) menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi

dalam politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya.

Praktek politik yang dibarengi dengan transaksi keuangan juga ditengarai terjadi di Sumbar meskipun muncul di ranah hukum untuk kasus Solok. Oleh sebab itu, mungkin benar gambaran John Markoff (2002) bahwa Indonesia saat ini mengalami *hybrid* demokrasi, mekanisme demokrasi berlangsung secara bersama-sama dengan praktek-praktek *no* demokratis. Sebagai akibatnya, rasionalitas politik yang di dorong karena ada transaksi *money politics* ini perlu dipertanyakan.

Sebagaimana yang dikutip Sri Nuryanti (2014;155), dalam tulisannya, Larry Diamond menyebutkan bahwa partisipasi yang dilandasi oleh motif lain akan melahirkan demokrasi semu (*pseudo democracy*), dimana demokrasi yang berlangsung bukan demokrasi yang sebenarnya demokrasi. Pemilih akan menganggap wajar atas *money politics* yang terjadi, karena bisa jadi hal itu sudah menggejala secara umum di berbagai wilayah. Burhanudin Muhtadi (2013) mengatakan bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pemilih yang tinggal di desa lebih rentan terhadap sasaran politik uang.

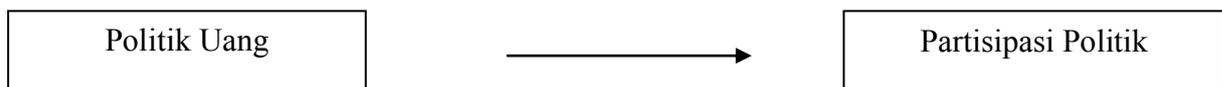
Model Analisis

Model analisis merupakan gambaran sederhana tentang hubungan antar variabel. Karena penelitian ini menggunakan dua variabel (*bivariat*) maka model analisisnya adalah sebagai berikut:

Bagan 1
Model Analisis

Independent Variabel (X)

Dependent Variabel (Y)



Hipotesis

Berdasarkan pemahaman tinjauan kepustakaan dan konstruksi model teoritis di atas, maka dapat diajukan hipotesis:

- Ho : Tidak ada pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada serentak 2015.
- Ha : Ada pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada serentak 2015.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tipe penjelasan (*eksplanatory research*). Dengan teknik atau metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel *Probability Sampling* dengan menggunakan random sampling karena yang menjadi populasi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang memperoleh hak pilih dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2015 dengan jumlah sample yang digunakan adalah 100 orang responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal atau diperoleh dari kuesioner yang digunakan serta data sekunder.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan program komputer *Statistick Package For Social Science 21* atau *SPSS 21* Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan koefisien korelasi Kendall Tau (τ) sebagai uji hipotesis. Korelasi *rank* kendall ini memiliki pengukuran ordinal terhadap variabel-variabel X dan Y, sehingga setiap subyek dapat

diberi *ranking* pada X maupun Y, maka τ akan memberikan suatu ukuran tingkat asosiasi atau korelasi antara kedua himpunan *ranking* itu (Sidney Siegal, 1999:264-265).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan (Mochtar Masoed, 2003:43). Almond dalam Damsar (2010:186) membedakan partisipasi atas dua bentuk, salah satunya partisipasi politik konvensional.

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat partisipasi masyarakat pada setiap aspek kegiatan Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Dharmasraya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan kepala daerah pada Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Dharmasraya.

Komposisi Masyarakat Ikut Memilih Pada Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015

Untuk mengetahui komposisi pilihan masyarakat terhadap tingkat kehadiran pada saat Pemilihan pada Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Masyarakat Ikut Memilih dalam Pilkada serentak 2015

Kehadiran	Persentase
Ya, Ikut	97 %
Tidak Ikut	3 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa hanya 3% masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang tidak ikut memilih pada Pilkada Serentak Tahun 2015.

Komposisi Pilihan Masyarakat Berdasarkan Pasangan Kandidat Yang Dipilih Pada Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015

Untuk mengetahui komposisi pilihan masyarakat berdasarkan pasangan kandidat yang dipilih pada Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015, dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Komposisi Pilihan masyarakat Berdasarkan Pasangan Kandidat Yang Dipilih

Pilihan	Persentase
Sutan Rizka Kerajaan / Amrizal	83 %
Adi Gunawan / Jonsosn Putra	14 %
Tidak Memilih	3 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa dari 100 % masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang ikut serta pada Pilkada Serentak 83 % memilih pasangan Sutan Rizka Kerajaan/Amrizal, 14% pemilih memilih Adi Gunawan/Jonsosn Putra dan 3% masyarakat Kabupaten Dharmasraya tidak ikut memilih pada saat Pilkada tersebut.

Komposisi Masyarakat Yang Menjadi Tim Sukses Kandidat Peserta Pilkada

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang pernah menjadi tim sukses Pilkada, dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Komposisi Masyarakat Yang Pernah Menjadi Tim Sukses Pilkada

Menjadi Tim Sukses	Persentase
Tidak pernah	54 %
Sering	46 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50% masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang ikut pada Pemilihan kepala daerah tidak pernah menjadi tim sukses pada Pemilu/Pilkada, dan Ada juga yang sering menjadi tim sukses pada Pemilu/Pilkada.

Komposisi Masyarakat Yang Aktif Mempromosikan Kandidat Peserta Pilkada

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang aktif mempromosikan kandidat peserta Pilkada, dapat dilihat dalam Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Komposisi Masyarakat Yang Aktif Mempromosikan Kandidat peserta Pilkada

Aktif Promosi	Persentase
Tidak pernah	51 %
Kadang – Kadang	32 %
Sering	17 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 5.9 di atas dapat dilihat hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut serta dalam mempromosikan kandidat peserta Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015.

Komposisi Masyarakat Yang Menghadiri Kampanye Pilkada

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang aktif mempromosikan kandidat peserta Pilkada serentak Dharmasraya 2015, dapat dilihat dalam Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
Komposisi Masyarakat Yang Menghadiri Kampanye Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015

Hadir Kampanye	Persentase
Tidak pernah	44 %
Kadang – kadang	32 %
Selalu	24 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa ketertarikan masyarakat terhadap kampanye yang diselenggarakan kandidat relatif tinggi.

Komposisi Masyarakat Yang Memberikan Sumbangan Keuangan kepada Kandidat Peserta Pilkada

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang memberikan sumbangan keuangan kepada kandidat peserta Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7
Komposisi Masyarakat Yang Memberikan Sumbangan Keuangan Kepada Kandidat

Memberikan Sumbangan	Persentase
Tidak pernah	99 %
Kadang – kadang	1 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat, bahwa 99% masyarakat Kabupaten Dharmasraya tidak pernah memberikan sumbangan keuangan kepada kandidat peserta Pilkada serentak 2015. Namun ada 1% masyarakat yang mau memberikan sumbangan. Artinya bahwa partisipasi yang ditunjukkan oleh sebagian kecil masyarakat Kabupaten Dharmasraya tidak hanya secara moril saja namun juga materil.

Komposisi Masyarakat Yang Mengikuti Diskusi-Diskusi Politik

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang mengikuti diskusi – diskusi politik, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8
Komposisi masyarakat Yang Mengikuti Diskusi – Diskusi Politik

Alasan	Persentase
Tidak pernah	38 %
Kadang – Kadang	39 %
Sering	23 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dilihat, bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten tergolong relatif tinggi. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. 62% masyarakat Kabupaten Dharmasraya pernah mengikuti diskusi-diskusi politik. Artinya, partisipasi politik masyarakat tidak hanya terlihat pada hari H Pilkada tetapi juga kegiatan politik lainnya.

Komposisi Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan – Pelatihan Politik

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang mengikuti pelatihan – pelatihan politik, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9
Komposisi Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan – Pelatihan Politik

Alasan	Persentase
Tidak Pernah	95 %
Kadang – Kadang	3 %
Sering	2 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat dilihat, bahwa pelatihan politik hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Ada sekitar 5% masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan politik.

Komposisi masyarakat Yang Pernah Menjadi Penyelenggara Pilkada

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang pernah menjadi penyelenggara Pilkada, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 10
Komposisi Masyarakat Yang Pernah Menjadi Penyelenggara Pilkada

Menjadi Penyelenggara Pilkada	Persentase
Tidak pernah	64 %
Kadang – Kadang	23 %
Sering	13 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat dilihat, bahwa terdapatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada baik itu sebagai anggota PPS, PPK dan lain-lain.

Komposisi Masyarakat Yang Pernah Menjadi Anggota Partai Politik

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang pernah menjadi anggota partai politik, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 11
Komposisi Masyarakat Yang Pernah Menjadi Anggota Partai Politik

Menjadi Anggota Partai	Persentase
Tidak Pernah	97 %
Pernah	3 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 12 di atas dapat dilihat, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3% masyarakat Kabupaten Dharmasraya pernah menjadi anggota partai politik.

Komposisi Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Partai Politik

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang mengikuti setiap kegiatan politik, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 13
Komposisi Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Partai Politik

Mengikuti Kegiatan Politi	Persentase
Tidak pernah	97 %
Kadang – kadang	1 %
Sering	2 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 13 di atas dapat dilihat, dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa masyarakat yang menjadi anggota partai politik terlibat aktif ikut terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang diselenggarakan oleh partai.

Komposisi Masyarakat Yang Mengikuti Organisasi Kemasyarakatan

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang mengikuti organisasi kemasyarakatan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 14
Komposisi masyarakat Yang Mengikuti Organisasi Kemasyarakatan

Mengikuti Organisasi Kemasyarakatan	Persentase
Tidak Pernah	43 %
Kadang – kadang	39 %
Sering	18 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dilihat, bahwa minat dan keterlibatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam organisasi masyarakat relatif besar. Masyarakat yang kadang-kadang mengikuti organisasi kemasyarakatan 39% dan yang sering mengikuti organisasi masyarakat terdapat 18%.

Komposisi Masyarakat Yang Pernah Ikut Serta Dalam Merumuskan Kebijakan Publik

Untuk mengetahui komposisi masyarakat yang pernah ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 15

Komposisi masyarakat Yang Pernah Ikut Serta Dalam Merumuskan Kebijakan Publik

Pernah Ikut Merumuskan Kebijakan	Persentase
Tidak pernah	67 %
Kadang – Kadang	19 %
Sering	14 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 15 di atas dapat dilihat, dari 100 masyarakat yang dilakukan penelitian 67% masyarakat mengatakan tidak pernah ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik. Karena biasa yang terlibat hanyalah perwakilan.

Politik Uang

Dilihat dari teori pilihan rasional, James Coleman (2011:37-38) menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik.

Sikap Masyarakat Terhadap Hadiah Berupa Uang, Barang, dan Jasa Dari Seseorang Yang Mengharapkan Dukungan Dalam Pilkada

Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap hadiah berupa uang, barang dan jasa dari seseorang yang mengharapkan dukungan dalam Pilkada, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 16
Komposisi Sikap Masyarakat Terhadap Hadiah Berupa Uang,Barang, dan Jasa
Dari Seseorang Yang Mengharapkan Dukungan Dalam Pilkada

Minat	Persentase
Menolak karena haram	41 %
Terima dulu, soal pilihan nanti	30 %
Terima tapi tidak pilih orangnya	27 %
Terima akan saya pilih orangnya	2 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 16 di atas dapat dilihat, bahwa sikap masyarakat Kabupaten Dharmasrya terhadap hadiah berupa uang, barang dan jasa dari seseorang yang mengharapkan dukungan dalam Pilkada bervariasi. Namun, sebagian besar masyarakat akan menolak hal tersebut karena haram. Dan, juga tidak sedikit yang mengatakannya akan menerima pemberian tersebut walaupun dengan alasan yang berbeda. Masyarakat yang akan menerima pemberian tersebut ada yang akan memilih orang dan ada yang mengatakan tidak. Gambaran diatas menjelaskan bahwa masyarakat menganggap wajar atas politik uang. Hal ini sesuai dengan temuai Burhanudin Muhtadi (2013) bahwa masyarakat pedesaan lebih rentan terkena politik uang.

Komposisi Masyarakat Menerima Uang Ketika Menghadiri Kampanye Kandidat peserta Pilkada

Untuk mengetahui komposisi masyarakat menerima uang ketika mengahdiri kampanye kandidat peserta Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 17
Komposisi masyarakat Menerima Uang
Ketika Menghadiri Kampanye Kandidat Peserta Pilkada

Minat	Persentase
Tidak pernah	88 %
Kadang – kadang	9 %
Sering	3 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 17 di atas dapat dilihat, bahwa 88 % masyarakat menjawab tidak pernah menerima uang ketika mengahdiri kampanye kandidat peserta Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015, selanjutnya 9% menjawab kadang-kadang dan 3% menjawab sering menerima uang ketika mengahdiri kampanye kandidat peserta Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015. Artinya kehadiran masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada kampanye kandidiat peserta Pilkada dimotivasi oleh uang.

Komposisi Masyarakat Menerima Uang Menjelang Pilkada

Untuk mengetahui komposisi masyarakat menerima uang menjelang Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat dalam Tabel 18 di bawah ini;

Tabel 18
Komposisi Masyarakat Menerima Uang Menjelang
Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015

Minat	Persentase
Tidak	73 %
Ragu – ragu	9 %
Iya	18 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 18 di atas dapat dilihat, bahwa adanya politik uang pada Pilkada 2015 terlihat dari 18% masyarakat Kabupaten Dharmasraya menerima uang menjelang Pilkada.

Komposisi Masyarakat Menerima Uang Transport Menjelang Hari H Pilkada

Untuk melihat komposisi masyarakat menerima uang transport menjelang hari H Pilkada Serentak Kabupaten Dharmasraya 2015, dapat dilihat dalam tabel 19 di bawah ini :

Tabel 19
Komposisi Masyarakat Menerima Uang Transport Menjelang Hari H
Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015

Minat	Persentase
Tidak pernah	100 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 19 di atas dapat dilihat, dari penelitian yang dilakukan masyarakat Kabupaten Dharmasraya mengatakan tidak pernah menerima uang transport menjelang hari H Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015.

Komposisi Pendapat Masyarakat Mengenai Pemilih Yang Memilih Karena Ada Hadiah Berupa Uang/Barang/Jasa

Untuk melihat komposisi pendapat masyarakat mengenai pemilih yang memilih karena ada hadiah berupa uang/barang/jasa, dapat dilihat dalam Tabel 20 di bawah ini :

Tabel 20
Komposisi Pendapat Masyarakat Mengenai Pemilih Yang Memilih
Karena Ada Hadiah Berupa Uang/Barang/Jasa

Minat	Persentase
Biasa Saja	15 %
Menggadaikan hak pilih	15 %
Tidak punya prinsip	10 %
Merendahkan diri Sendiri	16 %
Itu Pilihan Masing-masing	44 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 20 di atas dapat dilihat, pendapat masyarakat Kabupaten Dharmasraya mengenai pemilih yang memilih karena ada hadiah berupa uang/barang/jasa bervariasi. Namun, sebagian besar masyarakat menjawab itu merupakan pilihan masing-masing pemilih.

Komposisi Catatan Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015

Untuk mengetahui komposisi catatan masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015, dapat dilihat dalam Tabel 21 di bawah ini :

Tabel 21
Komposisi Catatan Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada serentak Kabupaten Dharmasraya 2015

Minat	Persentase
Jujur dan Adil	51 %
Banyak Politik Uang	49 %
Jumlah	100 %

Sumber : Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 21 di atas dapat dilihat, bahwa penilaian masyarakat Kabupaten Dharmasraya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2015 tidak hanya jujur dan adil tetapi juga ada yang mengatakan bahwa pada Pilkada juga banyak terdapat politik uangnya. Praktek politik uang yang dibarengi dengan transaksi keuangan di Sumatera Barat tidak hanya terjadi di Kabupaten Dharmasraya tetapi juga pernah terjadi di Kabupaten Solok yang kasusnya sampai keranah hukum.

Analisis Data

Korelasi Kendall Tau Antara Variabel Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Kabupaten Dharmasraya 2015 (Y) Dengan Variabel Politik Uang (X3)

Untuk melihat korelasi *Kendall tau* antara tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak Kabupaten Dharmasraya 2015 (Y) dengan politik uang (X3), dapat dilihat dari hasil analisis output SPSS pada tabel di bawah ini :

Tabel 22
Korelasi Kendal Tau Variabel Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat (Y) Dengan Politik Uang (X3)

			Partisipasi Politik	Politik Uang
Kendall's tau	Partisipasi Politik	Correlation Coefficient	1,000	,223
		Sig. (2-tailed)	.	,009
		N	100	100
	Politik Uang	Correlation Coefficient	,223	1,000
		Sig. (2-tailed)	,009	.
		N	100	100

Sumber : Data Primer Tahun 2016

Berdasarkan hasil analisis pada tabel *Kendall tau* di atas dapat disimpulkan bahwa diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,223. Dari tabel koefisien korelasi, diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara variabel X3 dengan Variabel Y. Korelasi mengidentifikasi semakin tinggi/kuat politik uang, semakin tinggi juga korelasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Apabila dilihat dari nilai signifikansi di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi terdapat hubungan politik uang memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 dengan perhitungan koefisien korelasi *Kendall Tau* sebesar 0,223.

Sebagaimana yang dikutip Sri Nuryanti (2014;155), dalam tulisannya, Larry Diamond menyebutkan bahwa partisipasi yang dilandasi oleh motif lainakan melahirkan demokrasi semua (*pseudo democracy*), dimana demokrasi yang berlangsung bukan demokrasi yang sebenarnya demokrasi. Pemilih akan menganggap wajar atas *money politics* yang terjadi, karena bisa jadi hal itu sudah menggejala secara umum di berbagai wilayah. Burhanudin Muhtadi dalam hasil survey indikator (2013) bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang merupakan hal yang wajar. Menurutny, pemilih yang tinggal di desa lebih rentan terhadap sasaran politik uang.

E. KESIMPULAN

Hasil analisis uji *Kendall Tau* menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,223. Artinya, terdapat hubungan positif antara variabel X3 dengan variabel Y. Korelasi mengidentifikasi semakin tinggi/kuat politik uang, semakin tinggi juga korelasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Politik uang menjadi salah satu factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada Serentak 2015. Faktor ini mempengaruhi setiap lapisan masyarakat baik yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi mupun rendah.

Namun selain itu, ada faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat partisipasi yaitu faktor status sosial ekonomi dan kesadaran politik.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aidinil Zetra, Bakaruddin Rosyidi, dan Ferra Yanuar. 2015. *Laporan Riset Voluntarisme Politik Masyarakat Kota Payakumbuh 2015*. KPU Kota Payakumbuh
- Burhanudin Muhtadi, 2013. *Laporan Survey Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap money politics*. Jakarta: Indikator
- Cholid Narbuka, dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hendarmin, Ranadireksa. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung : Fokusmedia
- James, Coleman. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media
- John Markoff. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan perubahan Politik*. Yogyakarta: CCSS
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mark N. Franklin. 2004. *Voter Turn out and The Dynamics of Electoral Competition in Established Democracy Since 1945*. New York : Cambridge University Press
- Michael Rush dan Phillip Althoff. 1971. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miriam, Budiardjo. 2008. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mochtar, Mas' oed. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rafael Raga Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ramlan, Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Samuel P Huntington dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sidney, Siegal. 1992. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Sri, Nuryanti. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014*, dalam riset “Partisipasi Pemilih Pada Peilu 2014 ; studi penjangkauan”, www.kpu.go.id di akses pada 11 february 2016, pkl; 15.28 wib
- Steven J. Rosenstone, Jhon Mark Hansen.1993.*Mobilization, Participation and Democracy in Amerika*. New York: Pearson College Division
- Sudijono, Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang
- Verba S, Nie N.1972. *Participation in america: Political Democracy and Social Equality*. New york: Harper and Row
- <http://beritanda.com/index.php/suara-pemilu/10410-sebagian-besar-daerah-di-sumbar-ditemukan-pelanggaran-pilkada-serentak> diakses tanggal 22 Februari 2016, 16:01 wib